

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan peristiwa WNI yang disandera oleh kelompok separatis (kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu golongan atau bangsa) di Filipina. WNI yang disandera merupakan nelayan yang saat itu sedang berlayar didekat perairan Sulu, Filipina. Kapal yang mereka bawa tiba-tiba di bajak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan membawa mereka ke tempat perasingan. Sekelompok orang tersebut merupakan pecahan dari kelompok separatis Filipina yaitu MLNF atau Front Pembebasan Nasional Moro. Kelompok ini tidak hanya menyandera WNI saja melainkan ada beberapa warga asing lainnya, bahkan ada pula penduduk asli yang juga menjadi sandera mereka.

Kelompok melakukan beberapa aksi kriminal seperti merompak dan melakukan penyanderaan terhadap warga asing maupun warga domestik Filipina. Penanderaan ini dilakuka bertujuan untuk meminta sejumlah uang tebusan kepada negara atau pemerintah dan keluarga dari sandera mereka, termasuk juga sandera WNI. Kasus penyanderaan WNI yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini merupakan kesekian kali

terjadi sejak tahun 2005. Dan ditahun 2016 lalu terjadi lagi penanderaan WNI sebanyak dua kali yaitu pada 26 Maret 2016 dan pada 15 April 2016.

Menghadapi peristiwa ini pemerintah Indonesia melakukan operasi untuk membebaskan WNI yang ditahan oleh kelompok tersebut. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, banyak pihak menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera membayar uang tebusan yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf, atau menggunakan kekuatan militer mengingat militer Indonesia cukup diperhitungkan di Asia, namun pemerintah Indonesia lebih memilih jalur diplomasi dalam penyelesaian kasus tersebut.

Dalam hubungan antar negara (hubungan Internasional) banyak sekali jalur yang digunakan terutama dalam penyelesaian sebuah masalah yang melibatkan keamanan dua negara atau lebih. Diplomasi merupakan alat yang digunakan Pemerintah dalam kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Pembebasan sandera WNI ini dikatakan berlangsung singkat, tanpa uang tebusan dan ditambah lagi sandera yang dilepaskan dengan kondisi baik tanpa luka sedikitpun dan tentu saja sebagai dampak dari keberhasilan diplomasi Indonesia.

Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Selaras dengan hal tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut aktif dalam penelenggaraan HAM (Hak Asasi Manusia). Oleh sebab itu, keselamatan warga negara merupakan prioritas utama dalam upaa pembebasan sandera Abu Sayyaf.

Keberhasilan Diplomasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari proses negosiasi yang dilakukan secara terus-menerus dan selalu meng-Update perkembangan kondisi serta situasi para sandera oleh pihak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina. Selain proses negosiasi dari Pemerintah, dari awal Presiden Joko Widodo telah mengerahkan semua akses yang dirasa berpotensi untuk membantu proses Diplomasi tersebut salah satunya keterlibatan Jendral TNI (Purn) Kivlan Zein, tenaga pengajar dari yayasan Sukma milik Surya Paloh, keterlibatan Palang Merah yang tidak luput juga dari peran Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam proses negosiasi.

Untuk itu, kasus ini menjadi menarik karena diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dikatakan 99% berhasil, serta melibatkan banyak aktor didalamnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan diplomasi ini dan siapakah tokoh yang paling berperan dalam upaya pembebasan sandera Abu Sayyaf akan dikupas dalam tulisan ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diambil perumusan masalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam pembebasan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina ?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari yang sudah di paparkan pada latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam kasus Pembebasan Sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

D. LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka dasar teori Diplomasi yaitu *Multitrack Diplomacy* atau yang disebut sebagai Diplomasi jalur kedua. Teori ini membahas mengenai aktifitas diplomasi dimana aktor yang berperan didalamnya tidak hanya berasal dari aktor pemerintah saja (*Single track Diplomacy*), namun juga melibatkan aktor individu seperti NGO, INGO, Perusahaan Multinasional, dsb.

Sir Ernest Satow (1922) mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelegen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat. Sejalan dengan Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar Negara atau hubungan antar Negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.¹

Terlepas dari aktor yang melakukan diplomasi, sejatinya diplomasi dilakukan untuk menjaga dan memajukan kepentingan suatu Negara dengan cara damai. Oleh karena itu, pemeliharaan perdamaian tanpa mencederai kepentingan nasional suatu Negara merupakan tujuan utama

¹Sukawarsi Djaelantik. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal.3.

dilaksanakannya diplomasi. Karena kemenangan sesungguhnya dalam diplomasi adalah tidak datang dari kemenangan dalam berperang, melainkan kemenangan dalam mencegah perang.

Dalam prakteknya, diplomasi artinya belajar mempengaruhi pikiran, pilihan dan tindakan pihak lain dalam sebuah perundingan atau pembuatan kesepakatan sehingga keluarannya tidak merugikan pihaknya, juga tidak membuat pihak lain merasa kalah atau rugi dalam perundingan tersebut.²

Jadi bisa dikatakan bahwa diplomasi merupakan suatu tindakan mempengaruhi pihak lain untuk mencapai suatu tujuan dengan cara damai atau yang biasa disebut sebagai *win win Solution*. Seperti yang disampaikan oleh kaum idealis bahwasanya diplomasi dipraktikkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih dari sekedar mencapai kemenangan material/fisik, diplomasi berfungsi untuk memenangkan hati manusia, mengubah cara pandang dan sikap yang saling berlawanan, hingga masing-masing pihak mau menerima perdamaian dan optimis kepada nilai-nilainya.³

Teori-teori diplomasi yang dikenal sekarang dibentuk dengan kerangka pengalaman Negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika Utara. Dengan kemajuan hubungan Internasional pada abad ke 20 dan munculnya AS sebagai kekuatan baru, pemikiran Amerika telah mempengaruhi praktek diplomasi secara signifikan. Namun, berakhirnya

²Rani, Emilia. *Praktek Diplomasi*, Jakarta:Badouse Media,2013,hal.4.

³ Ibid,hal.6.

perang dingin membawa perubahan dalam konteks internasional dimana diplomasi dijalankan. Dimana berakhirnya perang dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet memunculkan ekspektasi tinggi mengenai bagaimana suatu dapat dicapai dengan diplomasi dan negosiasi.

Di awal abad ke 21, diplomasi pada level internasional memiliki dua karakteristik. Pertama adalah diplomasi yang diawali pada tataran global. Berakhirnya perang dingin membuat Negara-negara keluar dari pratek diplomasi yang dijalankan selama perang dingin berlangsung. Kondisi diplomasi yang pada awalnya selalu terfokus pada Barat dan Timur berubah menjadi Utara dan Selatan tentu dengan melibatkan isu yang *low politics* dengan cakupan global seperti kemiskinan dan pembangunan dalam aktivitas diplomasinya. Kedua, diplomasi memiliki karakteristik yang kompleks dan terpisah-pisah atau terfragmentasi. Karakteristik ini dapat kita lihat bahwa munculnya banyak aktor dalam diplomasi membuat *multilateralisme* semakin kompleks seperti halnya proses bilateral dan substansi dari diplomasi global yang mencakup isu yang lebih luas dari sebelumnya.

Perubahan diplomasi dipengaruhi oleh perang dingin, sehingga konflik ideologi menjadi bagian dari diplomasi pada waktu itu. Pelaku atau aktor dalam diplomasi juga mengalami perubahan yang sebelumnya hanya berasal dari kelompok elit internasional, kini peran masyarakat internasional (Publik) juga mulai diperhatikan. Diplomasi lama yang dikenalkan oleh bangsa Eropa yang ditandai dengan adanya Konvensi

Wina 1815, bahwasanya diplomasi merupakan hubungan antara dua Negara yang berdaulat atau wakil Negara. Namun, diplomasi terbuka yang dikemukakan oleh mantan Presiden AS Wodrow Wilson 1918 menyatakan bahwa diplomasi tidak hanya anantara wakil-wakil Negara yang berdaulat saja, melainkan peran masyarakat Internasional juga turut diperhatikan.

Kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi telah membuat peran diplomat menjadi kurang signifikan diandingkan dengan masa sebelumnya. Teknologi transportasi dan komunikasi menyebabkan waktu dan tempat kehilangan relevansinya sehingga diplomasi tradisional sudah harus ditinggalkan untuk dapat menyesuaikan zaman. Dengan kemajuan teknologi tersebut munculah perkembangan diplomasi jalur kedua dan *multitrack diplomacy*.

Diplomasi jalur kedua dicirikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan pemerintah, informal, dan memiliki sifat tidak resmi dalam menangani konflik-konflik antar kelompok masyarakat yang tujuannya untuk menurunkan ketegangan dengan cara meredakan kemarahan, ketakutan dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian⁴.

Diplomasi jalur kedua atau juga disebut sebagai diplomasi publik bukan berarti menggantikan melainkan untuk melengkapi upaya-upaya dilakukan pemerintah dalam diplomasi jalur pertama. Namun, idealnya diplomasi jalur kedua ini harus membuka jalan bagi negosiasi yang

⁴Sukawarsi Djaelantik. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 20.

dilakukan antar pemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting serta memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah.

Akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa jalur kedua tidak dapat menjangkau jenis dan keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, sejak satu dekade lalu, mulai diperkenalkan konsep diplomasi multi jalur atau yang disebut sebagai *Multitrack diplomacy* yang melibatkan sembilan elemen masyarakat yaitu :

1. Jalur pertama atau pemerintahan atau juru damai melalui diplomasi yaitu, Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang menjadi aktor utama dalam diplomasi dan negosiasi yang bertindak sebagai pembuat kebijakan, dan bertugas membuka jalan bagi upaya-upaya perdamaian.
2. Kelompok NGO/kalangan professional atau juru damai melalui resolusi konflik. Merupakan aksi professional non pemerintah yang bertujuan mengorganisir, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik-konflik internasional yang dilakukan oleh aktor bukan Negara.
3. Kelompok bisnis atau juru damai melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Potensi pengaruh yang ditimbulkan sangat luar biasa karena terkait dengan penyediaan lapangan kerja, kesempatan bisnis, kerjasama perdagangan,

yang pada akhirnya menumbuhkan saling pengertian diantara bangsa-bangsa di dunia. Sebagai saluran tidak resmi, juga dapat memberikan materi untuk membiayai aktivitas-aktivitas perdamaian lainnya.

4. Warga Negara biasa atau juru damai perorangan (*citizen diplomacy*). Termasuk didalamnya upaya masyarakat yang terlibat dalam aktifitas perdamaian maupun perdagangan, program pertukaran, organisasi swasta perorangan, organisasi non pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan.
5. Aktivitas penelitian, pelatihan, pendidikan atau perdamaian melalui pembelajaran. Jalur ini termasuk tiga dunia yang saling terkait, yaitu kegiatan penelitian yang terkait dengan program universitas, keberadaan pusat-pusat kajian, pusat penelitian, program-program pelatihan yang tujuannya member pelatihan dan keterampilan praktis seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, fasilitasi pihak ketiga, dan sarana-sarana pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai program doctor. Aktivitas-aktivitas yang ditawarkan bisa sangat beragam dengan jangkauan global atau lintas budaya, studi tentang perdamaian dan tatanan dunia, serta menejemen dan resolusi konflik.

6. Aktivisme atau juru damai melalui advokasi. Jalur ini mencakup bidang perdamaian dan lingkungan seperti masalah perlucutan senjata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi, dan advokasi yang dilakukan kelompok-kelompok kepentingan khusus.
7. Kelompok agama. atau juru damai melalui penebalan keimanan. Termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan spiritual oleh komunitas agama yang berasaskan ajaran-ajaran moral, perdamaian, pesantren, dan ajaran untuk tidak memakai kekerasan (*non-violent*) dalam menyelesaikan perbedaan.
8. Perdamaian melalui penyediaan dana. Kegiatan ini mengacu pada organisasi-organisasi keuangan berbentuk yayasan maupun sumbangan perorangan dalam menyediakan dana bagi program-program yang dilakukan jalur-jalur diplomasi lain.
9. Komunikasi dan media, atau perdamaian melalui penyediaan informasi. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari suara rakyat, bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media massa baik cetak maupun elektronik.⁵

⁵ Louise Diamond dan John McDonald, *Multitrack Diplomacy, A Sistem Approach to Peace*, Institute of Multytrack Diplomacy, Washington D.C, hal 4-5

Diplomasi multipilar atau *multytrack diplomasy* merupakan diplomasi yang melibatkan banak aktor. Dalam sistem multi-pilar kemitraan dan kolaborasi adalah kata kuncinya. Agen pemerintah, proffesional, sektor swasta dan masyarakat sipil terintegrasi dalam usaha-usaha pemerintah dalam memberikan pelayan diplomasi.⁶

Diplomasi multi-pilar atau yang disebut juga sebagai diplomasi multi jalur ini mendefinisikan bahwa suatu tujuan dapat dicapai selain melalui cara formal yang melibatkan aktor-aktor pemerintah dalam aktivitas dilplomasi,yang tidak boleh dikesampingkan adalah komunikasi dengan aktor-aktor bukan pemerintah, termasuk dengan NGO dan media massa internasional.

Jalur ini penulis gunakan dalam menganalisis faktor keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam pembebasan sandera Abu Sayyaf mengingat banyak aktor yang terlibat didalamnya termasuk pengiriman intelejen Indonesia ke Filipina, dan beberapa aktor lain yang juga memiliki kontribusi dalam proses negoisiasi dengan pihak-pihak terkait untuk membebaskan para sandera.

⁶Rani, Emilia. *Praktek Diplomasi*, Jakarta:Badouse Media,2013,hal.86.

E. HIPOTESA

Keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam kasus Pembebasan Sandera WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf tidak terlepas dari peran serta kontribusi dari aktor-aktor Pemerintah maupun Non Pemerintah. Terlibatnya banyak aktor dalam pembebasan sandera ini menjadi tolok ukur keberhasilan Diplomasi Indonesia mengingat yang digunakan dalam proses ini adalah Diplomasi total yang melibatkan aktor-aktor tertentu yang memiliki jaringan atau kedekatan emosional dengan pihak-pihak terkait.

Negosiasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh banyak pihak dan pada jalur yang berbeda inilah yang membuat Kelompok Abu Sayyaf merasa diserang secara halus dari berbagai sisi dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan sandera bahkan tanpa uang tebusan. Selain itu, strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat baik dan mendapat respon yang positif dari pemerintah Filipina.

Adanya aktor non government (non pemerintah) turut mewarnai proses diplomasi dalam pembebasan sandera Abu Sayyaf. Dari para aktor non government inilah pemerintah Indonesia memperluas jaringan untuk mendapatkan informasi serta, strategi untuk membebaskan sandera. Selain diukur dari banyaknya aktor yang terlibat, keberhasilan diplomasi ini merupakan wujud dan upaya kongret pemerintah Indonesia dalam melayani dan melindungi warganya.

Sebagai bangsa yang berdaulat sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi warga. Kesiapan pemerintah Indonesia dalam upaya membebaskan sandera juga dapat dilihat dari peran aktif para pejabat tinggi dan penguasa di negeri ini dalam turut serta membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Masyarakat luas pun ikut berpartisipasi dalam upaya tersebut melalui organisasi, dan jaringan lainya untuk membantu proses diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara efisien dan koheren.⁷ Penelitian Kualitatif bertujuan meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses sosial. Penelitian ini lebih berfokus pada makna (meaning) dan pemahaman (understanding) dari pada kuantifikasi.⁸

Menurut Norman Denzin dan Yvonna Lincoln, tradisi penelitian kualitatif adalah bidang yang lintas disiplin ilmu sosial. Penelitian ini mencakup berbagai metode mulai dari wawancara untuk observasi, analisis wacana dan historis, serta yang sering disebut sebagai penelitian multi-metode. Penelitian kualitatif mempelajari fenomena dan aktor dalam

⁷ John C.King, "Qualitative Research Method in International Affairs for Maaster Student", dalam https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf (diakses 27 Mei 2015)

⁸ Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, hal 62

setting alamiah mereka. Untuk memahami proses dan fenomena melalui makna para aktor dan partisipan member mereka dalam istilah mereka sendiri.⁹

Sedangkan menurut Liz Spencer, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam konteks dan sering ditandai dengan *concern* untuk menemukan perspektif aktor, metode konteks-sensitif dan semi-terstruktur, kaya data, penjelasan ditingkat makna serta bagaimana dan mengapa pertanyaan diajukan.¹⁰

Metode Kualitatif ini secara umum merujuk pada pengumpulan data strategi atau teknik analisa data yang bergantung pada data non-numerik. Dimana data tersebut diperoleh menggunakan strategi meliputi wawancara, penelitian berbasis internet, penelitian berbasis internet atau arsip (*archival and document-based research*).

1. Strategi atau Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi atau metode pengumpulan data yaitu kombinasi dari penelitian berbasis dokumen atau arsip dan penelitian berbasis internet. Dokumen ini terbagi menjadi dua yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen asli atau (*original*), yang ditulis oleh

⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2011), hlm. 1-3

¹⁰ Liz Spencer (et.al.), *Quality in Qualitative Evaluation: A Framework for Assessing Research Evidence* (London: The Cabinet Office, 2003), hlm. 3.

individu yang memiliki akses langsung kepada informasi yang mereka gambarkan, atau mereka teliti, atau langsung mengalami peristiwa tertentu. Dokumen sekunder adalah dokumen yang mengacu pada dokumen primer atau menganalisis dokumen primer.¹¹

Menurut Kenneth D. Bailey, dokumen sekunder adalah dokumen yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer.¹² Kini kita tiba pada penelitian berbasis internet (*internet-based research*). Internet selain dapat dimanfaatkan untuk mengakses materi ilmiah tradisional (seperti artikel jurnal ilmiah dan buku), juga dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Sama seperti sumber lain darimana kita mengumpulkan informasi, dengan internet kita harus selalu memeriksa berbagai sumber yang kita gunakan. Perlu diketahui, halaman web dan konten mereka, dapat dibuat oleh siapa saja. Tidak ada penjaga gawang atau proses *peer-review* yang harus mereka lalui dalam mempublikasikan informasi di internet. Poliferasi di media sosial juga telah mengakibatkan sejumlah besar

¹¹ Umar Suryadi Bakri, *op cit*, hal 68

¹² Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research* (New York: The Free Press, 1994), hlm. 294.

data yang dihasilkan oleh individu.¹³ Dalam hal ini, pengumpulan data dari internet hanya mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu yang ingin kita cari untuk penelitian kita. Dimana kita dapat memanfaatkan situs berita online yang tersedia namun tetap teliti dalam memilih data berdasarkan keakuratan informasi yang didapat melalui konten dan web yang terpercaya seperti, BBC News, CNN, atau Metronews dan lain-lain.

2. Teknik Analisa

Ada beberapa teknik analisa kualitatif yang dikenal dalam metodologi penelitian, termasuk dalam tradisi penelitian HI. Namun yang banyak dikenal oleh para mahasiswa HI di negara-negara maju adalah teknik analisa isi (*content analysis*) dan analisis wacana (*discourse analysis*). Meskipun ada sejumlah sarjana, diantaranya Will Lowe, menempatkan analisis isi ke dalam penelitian empiris atau kuantitatif, namun banyak juga sarjana lain yang kurang sepakat. Bruce Berg dan Howard Lune, misalnya, menunjukkan bahwa analisis isi tidak melekat baik dengan penelitian kuantitatif maupun kualitatif.¹⁴

¹³ Alan Bryman, *Social Research Methods* (Oxford, NY: Oxford University Press, 2012), hlm. 479.

¹⁴ Bruce L. Berg dan Howard Lune, *Qualitative Methods for Social Sciences* (New York: Pearson, 2012), hlm. 354.

Menurut Lamont, analisis isi dapat mengasumsikan berbagai bentuk. Kita dapat melihat bahasa untuk memahami dan menjelaskan dunia sekitar kita (empiris), atau kita dapat menggunakan bahasa untuk memahami bagaimana bahasa membentuk dan memproduksi dunia sosial (interpretif). Dalam studi HI, ada sejumlah artikel atau kajian mengenai penggunaan teknik analisa isi, misalnya tulisan Margareth G. Hermann.¹⁵ Analisa wacana menaruh perhatian pada interpretasi bentuk-bentuk linguistik dalam sebuah komunikasi. Cynthia Hardy (et al) mendefinisikan analisis wacana sebagai metodologi untuk menganalisis fenomena sosial yang bersifat kualitatif, interpretif, dan konstruktivis.¹⁶

¹⁵ Margareth G. Hermann, "Content Analysis", dalam Audie Klotz dan Deepa Prakash, *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 151-167.

¹⁶ Cynthia Hardy (et al), "Discourse Analysis and Content Analysis: Two Solitudes?", dalam *Qualitative Methods*, Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 19.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang akan disusun pada Skripsi antara lain :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari :

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Hipotesa
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Penulisan

BAB II Pembahasan

Berisikan uraian pokok-pokok permasalahan yang dianalisa berdasarkan landasan teori yang diambil yaitu “gambaran umum kelompok Abu Sayyaf , kronologi penyanderaan dan proses pembebasannya ”.

BAB III

Berisikan jawaban dari Rumusan Masalah yang diambil yaitu “faktor yang mempengaruhi keberhasilan diplomasi indonesia (poin-poin multitrack diplomasi) dalam pembebasan sandera abu sayyaf ”.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dari dua pokok pembahasan diatas.

Daftar Pustaka